

BAB I

PENDAHULUAN

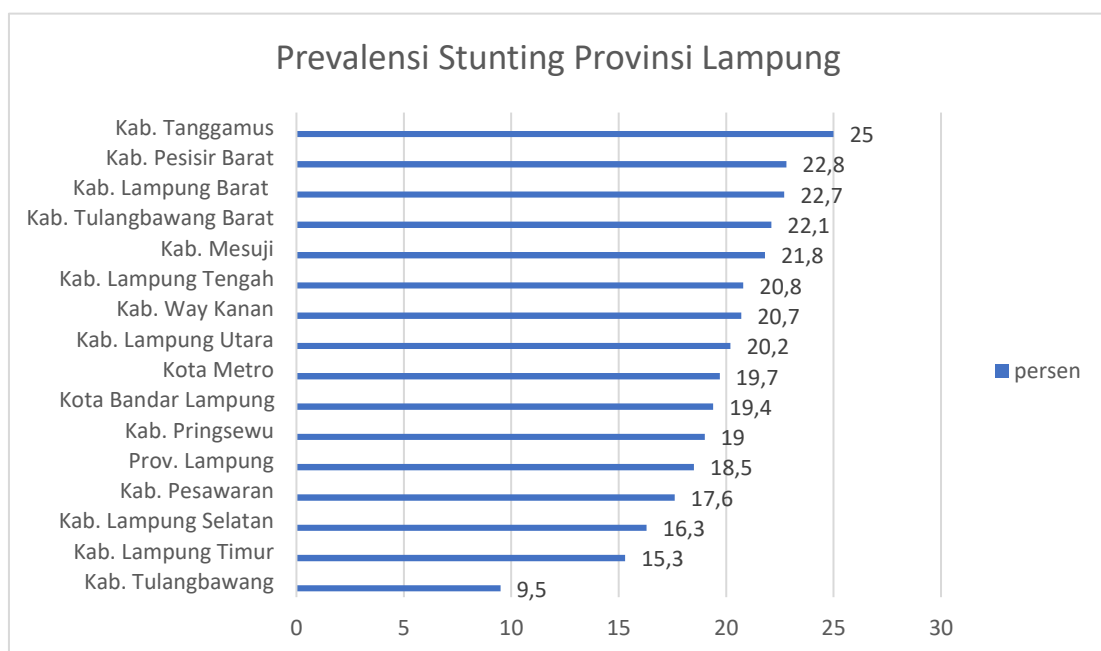
1.1. Latar Belakang Masalah

Fokus dari penelitian ini adalah kinerja kolaborasi pemerintah pencegahan dan penanggulangan *stunting* Di Kota Metro, Provinsi Lampung. Kolaborasi dalam tata Kelola pemerintahan mengenai pencegahan dan penanggulangan *stunting* bertujuan agar publik bisa berpartisipasi. Selain itu, kerja sama ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di daerah melalui program Jama-pai (Diskominfo, 2022b). *Stunting* sendiri merupakan keadaan yang dipengaruhi oleh kurangnya gizi pada balita yang kemudian ditandai dengan tubuh pendek. Permasalahan *stunting* di Indonesia dapat dikategorikan kronis karena masih berada di atas angka standar WHO. Di Indonesia prevalensi *stunting* masih pada angka 24,4% per tahun 2021, sedangkan WHO menghimbau bahwa angka maksimum *stunting* di sebuah negara adalah 20%. Kemudian dapat dilihat bahwa Indonesia masih berada di atas batas maksimum, sehingga permasalahan *stunting* di Indonesia masih tergolong kronis (P2PTM Kemenkes RI, 2018). Percepatan penurunan angka *stunting* di Indonesia dilakukan berdasarkan target RPJMN 2020-2024, untuk tahun 2022 ditargetkan berada pada angka 18,4% (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 13, 2022).

Berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) angka *stunting* Indonesia per tahun 2021 diperoleh angka sebesar 24,4%, Provinsi Lampung

berada pada urutan ke-31 pada data *stunting* se-Indonesia per tahun 2021 dengan angka sebesar 18,5% (Kusnandar, 2022a). Prevalensi balita penderita *stunting* di Kota Metro pada tahun 2021 berada pada urutan ke sembilan (9) dengan angka *stunting* sebesar 19,7% berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGBI) melalui pengukuran pada bayi usia 0-59 bulan di Provinsi Lampung.

Gambar 1. 1 Grafik Prevalensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2021



Sumber : (Kusnandar, 2022b)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan lokus *stunting*, Kota Metro termasuk di dalamnya (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021). Prevalensi *stunting* di Kota Metro berdasarkan data SSGI berada di bawah rata-rata nasional, tetapi masih di atas angka prevalensi dari Provinsi Lampung. Pada tahun 2021 prevalensi *stunting* di Indonesia pada angka 24,4%, Provinsi Lampung pada 18,5% dan Kota Metro pada angka 19,7%. Prevalensi *stunting* di Kota Metro yang berada pada di atas Provinsi Lampung menjadikan Kota Metro sebagai salah satu lokus *stunting*. Tujuannya adalah agar terciptanya penurunan secara signifikan pada angka *stunting* di Kota Metro. Berdasarkan Peraturan Walikota Metro No. 32 Tahun 2022 target penurunan angka *stunting* pada tahun 2022 yaitu 16,5%, pada tahun 2023 sebanyak 13,84% dan pada tahun 2024 sudah pada angka 11,11%. Untuk mencapai percepatan penurunan tersebut, menjadikan Kota Metro lokus *stunting* agar target tercapai (P. W. Metro, 2023).

Dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Metro belum terdapat program yang spesifik pada tahun sebelumnya. Tetapi Pemerintah Kota Metro sendiri pada LAKIP Dinas Kesehatan tahun 2021 menjelaskan bahwa terapat isu strategis dalam percepatan penanggulangan *stunting*. Sasaran program adalah dengan meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Program ini memiliki target angka *stunting* 9,9% pada tahun 2021 dan tercapai pada penurunan angka *stunting* menjadi 7,3% di Kota Metro (D. K. K. Metro, 2021). Kemudian pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Walikota Metro No.32 Tahun 2022 tentang Sinergi Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Metro dibentuk sebuah

program JAMA-PAI. Selain itu pemerintah Kota Metro juga memiliki rencana untuk menciptakan kota sehat dengan upaya penurunan angka *stunting* melalui program JAMA-PAI (Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu) (Diskominfo, 2021).

Upaya pemerintah Kota Metro dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* dilaksanakan melalui program JAMA-PAI (Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu). JAMA-PAI berarti bersama-sama atau bergotong royong, yang merupakan kolaborasi tata kelola pemerintahan terintegrasi dan melibatkan masyarakat. Dalam JAMA-PAI terbagi dalam intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui kerja sama multisektor baik pusat, daerah maupun desa/kelurahan. Tujuan dari program JAMA-PAI adalah agar terintegritasnya pelaksanaan penurunan angka *stunting* melalui kolaborasi yang dilakukan oleh lima aktor pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media. Selain itu program ini bertujuan agar dapat mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan supaya dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas (Admin, 2022).

Selanjutnya, kebijakan mengenai percepatan penurunan angka *stunting* sesuai dengan target RPJM 2022-2024 di Indonesia terapat pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menjelaskan bahwa pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting* dilakukan secara keseluruhan, terintegrasi, dan berkualitas yang dengan adanya kolaborasi, sinergis dan adanya penyelarasan antara pemangku kepentingan.

Kemudian juga terdapat dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022. Sehingga Kota Metro kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 416/KTPS/B-02/2021 Tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Metro (Diskominfo, 2022a). Oleh karena itu pentingnya permasalahan *stunting* ini merupakan target yang sedang dikejar oleh pemerintah pusat maupun daerah sehingga dilakukannya kolaborasi beberapa pemangku kepentingan agar dapat tercapai dengan maksimal. Kota Metro menjadi salah satu kota pilihan dalam percepatan penurunan angka *stunting* dengan menerapkan pendekatan kolaborasi *penta helix* pada beberapa Dinas, akademisi, komunitas, pelaku usaha dan media.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dalam upaya penurunan angka *stunting* pemerintah Kota Metro mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 416/KTPS/B-02/2021 Tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting*. Dimana melalui surat putusan tersebut dapat dilakukan juga kolaborasi melalui program JAMA-PAI dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Oleh karena itu, penulis tertarik mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Siapa saja dan bagaimana peran masing-masing stakeholder yang terlibat pada *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Metro, Provinsi Lampung?
2. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Metro, Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui siapa saja aktor pada *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Metro, Provinsi Lampung.
2. Mengetahui keterlibatan aktor dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada setiap tahapan *collaborative governance* di Kota Metro, Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis :

1. Dapat mengetahui siapa saja aktor pada *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Metro, Provinsi Lampung.
2. Dapat memahami keterlibatan aktor dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada setiap tahapan *collaborative governance* di Kota Metro, Provinsi Lampung.
3. Dapat mengetahui implementasi pada *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Metro, Provinsi Lampung.

1.4.2. Manfaat pragmatis :

1. Bagi peneliti

Dapat mengetahui aktor dalam kolaborasi serta memahami keterlibatan aktor kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya melalui program JAMA-PAI dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Metro.

2. Bagi masyarakat

Dapat sebagai strategi dalam percepatan penurunan *stunting* dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5. Tinjauan Pustaka

Berikut tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian terdahulu, tujuannya adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga didapatkan pembaruan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan literatur review terdahulu yang bersumber dari artikel jurnal yang memiliki topik mengenai kolaborasi tata kelola pemerintah dalam *stunting* sehingga berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti. Mengenai *Collaborative Governance* banyak mengkaji mengenai bentuk kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting* di suatu daerah.

Pada penelitian Rahayu (2020) meneliti tentang *collaborative governance* dalam meraih SDGs dalam pembangunan sosial dalam pencegahan *stunting* di Pandeglang menyebutkan bahwa proses kolaborasi Pada penelitian ini ditemukan masalah terkait pelaksanaan kolaborasi, yakni kurang adanya keterkaitan antar OPD dalam mencapai target sehingga pengukuran kinerja tim hanya dapat dilakukan oleh dinas kesehatan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan *stunting* melalui

collaborative governance belum baik dan belum menunjukkan keberlanjutan serta dampak yang nyata. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Herlianti (2022) meneliti tentang kolaborasi dalam jaringan pemangku kepentingan dalam pencegahan *stunting* di Bulukumba, pada penelitian ini menjelaskan mengenai peran dan bentuk koordinasi antara beberapa pemangku kepentingan mengenai program pencegahan *stunting* tetapi belum menunjukkan keberhasilan dalam kolaborasi sehingga diperlukannya lagi penelitian lebih Kolaborasi dalam pencegahan selanjutnya yakni pada penelitian Supriyatni dan kawan-kawan (2021) menggunakan program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dengan kegiatan yang dilaksanakan pada penelitian ini melalui penyuluhan. Hasil dari penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai penyebab dan pencegahan pada *stunting*, melalui analisis hasil *pre-test dan post-test*.

Selanjutnya, mengenai *collaborative governance* dalam penanggulangan *stunting* pada penelitian Ipan, Hanny dan Evi (2021) meneliti tentang kolaborasi di Ciampel menunjukkan adanya keberhasilan *collaborative governance* dalam penanggulangan *stunting* di Puskesmas Ciampel melalui keterlibatan sektor swasta dan masyarakat, selain itu juga terdapat penurunan angka *stunting* dari tahun 2019 sebanyak 367 sedangkan tahun 2020 sebanyak 257. Kemudian pada penelitian Putri dan Nurcahyanto (2021) juga menunjukkan keberhasilan dalam *collaborative governance* dengan menggunakan teori Ansell dan Gash yang tercapainya beberapa komponen dan ditunjukkan dengan adanya penurunan angka *stunting* melalui kegiatan kelas *stunting* yang diadakan setiap bulan di

Balai Desa Kalirandu. Tetapi masih ditemukan beberapa hambatan dalam proses kolaborasi seperti kurangnya komitmen dari kepala desa, keterbatasan SDM, dominasi dari sektor kesehatan dan permasalahan dalam pengunggahan data.

Pada penelitian Sukanti dan Faidati (2021) mengenai *collaborative governance* dalam penanggulangan *stunting* yang dilakukan di Kabupaten Sleman sudah berjalan baik dengan tercapainya prinsip, seperti keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Selain itu juga menunjukkan adanya penurunan angka *stunting*. Kegiatan kolaborasi yang dilakukan, yaitu Getar Thala, Gambang *Stunting*, PANdu TEMan, dan Pecah Ranting. Tetapi pada pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terdiri dari SDM yang berkualitas, SDA yang mendukung dan anggaran. Sedangkan faktor penghambat berupa kondisi lingkungan yang kurang sehat, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dan pola didik orang tua yang dipengaruhi tingkat pekerjaan. Berikutnya, penelitian yang dilakukan Nurhaeni dan kawan-kawan (2021) yang meneliti tentang kolaborasi dalam peningkatan pengetahuan penanggulangan *stunting* menunjukkan adanya pengaruh antara penanggulangan *stunting* dengan kolaborasi terhadap anak selama masa pandemi. Kolaborasi menghasilkan peningkatan berat badan anak, pengetahuan ibu dan kepuasan layanan IPC (*Interprofesional Collaboration*). Pada penelitian Wiyono dan teman-teman (2021) meneliti tentang penguatan aktor dalam kolaborasi melalui kegiatan seminar yang merupakan bentuk dari upaya kolaborasi dalam penanggulangan *stunting* menunjukkan adanya

peningkatan pengetahuan dari kegiatan pelatihan dan melakukan tindak lanjut kegiatan dengan mendatangi rumah orang tua balita *stunting* untuk memberi edukasi.

Dalam proses kolaborasi terdapat pendekatan dan program yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Risnah dan teman-teman (2021) meneliti tentang pelaksanaan kolaborasi menggunakan praktik FGD (*Focus Group Discussion*) mengenai *Interprofessional Collaboration* (IPC) dalam upaya pengendalian *stunting* dapat menunjukkan pemahaman dalam informasi penting dan upaya pengendalian *stunting* di Kecamatan Pamboan, Sulawesi Barat. Peserta dalam FGD yakni perwakilan keluarga, petugas kesehatan, pemerintah setempat, dan tokoh masyarakat, serta akademisi dosen UIN Alauddin Makassar. Selain itu, pada penelitian Afandi dan teman-teman (2022) meneliti tentang *collaborative governance* melalui pendekatan Penta Helix dalam permasalahan *stunting* menunjukkan sudah adanya keterlibatan dalam kelima aktor kolaborasi tetapi ada faktor penghambat yakni terhambatnya partisipasi setiap aktor yang dinilai berdasarkan rendahnya nilai konvergensi di kota/kabupaten Jawa Barat. Pada implementasi program juga belum tercapai sesuai harapan.

Pada penelitian Ahmad Saufi (2021) meneliti tentang dinamika *collaborative governance* dalam penanggulangan *stunting*, terdapat dinamika pada pelaksanaan *collaborative governance* yaitu belum komitmen dari pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga terdapat kesenjangan yang ditemukan pada adanya data yang menunjukkan peran yang dominan oleh

pemerintah dan membutuhkan waktu yang lama pada transformasi kebijakan. Penanggulangan *stunting* pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan *collaborative governance*. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Rosalia, Wulandari & Yulianti (2021) meneliti tentang pengukuran *collaborative governance* dalam Penanganan *Stunting* di Lampung dibutuhkan penguatan dalam aspek formal kesepakatan, kesepakatan bersama, dan hubungan informal. Sehingga ditemukan dua agenda yang diprioritaskan yaitu, pertama terkait struktur pemerintahan dengan adanya kejelasan antara kedudukan dan peran kabupaten/kota. Kedua, membutuhkan partisipasi dalam pengetahuan dalam permasalahan gizi.

Pada penelitian terdahulu praktik kolaborasi dalam percepatan penurunan *stunting* berfokus pada penurunan angka *stunting*, namun pada proses partisipasi menunjukkan belum terlaksana dengan baik. Kegiatan kolaborasi pada penelitian sebelumnya masih banyak yang menggunakan pendekatan dua aktor dan tiga aktor kolaborasi sehingga ditemukan hambatan pada proses kolaborasi yakni kurang aktifnya aktor yang berpartisipasi seperti pada masyarakat yang kurang mendukung program. Selain itu, juga terdapat hambatan yang berupa dominasi dari pemerintah yang kemudian menghambat efektivitas kolaborasi seperti keterlambatan dalam aspek regulasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kegiatan kolaborasi masih berfokus pada angka penurunan *stunting*. Kemudian pada beberapa literatur review belum terlalu fokus dalam membahas tahapan kolaborasi dan keterlibatan aktor yang menunjukkan keberhasilan proses

kolaborasi. Oleh karena itu, penulis melakukan pembaruan penelitian terkait partisipasi setiap pemangku kepentingan agar pelaksanaan *Collaborative Governance* dapat berjalan baik dengan menunjukkan keberhasilan dalam Proses dialog tatap muka, Membangun kepercayaan, Komitmen untuk proses, pemahaman bersama, serta dapat menunjukkan hasil jangka menengah.

Tabel 1. 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Tema Penelitian	Nama dan Tahun Penulis	Link Jurnal	Kesimpulan
1.	<i>Collaborative governance</i>	Risnah, Muhammad Irwan, dan Rosmah (2021)	Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas, 1(3), 149-156. https://jurnal.hip.ac.id/index.php/jpkk/article/view/954	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kolaborasi menggunakan praktik FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) mengenai <i>Interprofessional Collaboration</i> (IPC) melalui lima aktor kolaborasi dalam upaya pengendalian <i>stunting</i> dapat menunjukkan pemahaman dalam informasi penting dan upaya pengendalian <i>stunting</i>
		Muhamad Nur Afandi, Endah Tri Anomsari, Alikha Novira, Sri Sudartini (2022)	<i>The Proceedings of the 3rd International Conference Administration Science, 15th Sep 2022.</i> https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.15-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Collaorative governance</i> melalui pendekatan Penta Helix dalam permasalahan <i>stunting</i> menunjukkan sudah adanya keterlibatan dalam kelima aktor kolaborasi tetapi ada faktor penghambat yakni terhambatnya partisipasi setiap aktor yang dinilai berdasarkan rendahnya

			9-2021.2315238	nilai konvergensi. Pengukuran menggunakan penguatan dalam aspek formal kesepakatan, kesepakatan bersama, dan hubungan informal.
		Ahmad Saufi (2021)	<i>In Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan.</i> Vol. 01 No. 01 . https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/semnaspk/article/view/40	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan <i>collaborative governance</i> belum adanya komitmen dari pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga terdapat kesenjangan yang ditemukan pada adanya data yang menunjukkan peran yang dominan oleh pemerintah dan membutuhkan waktu yang lama pada transformasi kebijakan. Penanggulangan <i>stunting</i> pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan <i>collaborative governance</i>.
		Feni Rosalia, Jeni Wulandari, dan Yulianto (2021)	<i>Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020), VOL, 191</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam praktik kolaborasi dalam mengurangi <i>stunting</i> di Provinsi Lampung dibutuhkan penguatan dalam aspek formal kesepakatan, kesepakatan bersama, dan hubungan informal. Sehingga ditemukan dua agenda yang diprioritaskan yaitu, pertama terkait struktur pemerintahan

			http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/36603	dengan adanya kejelasan antara kedudukan dan peran kabupaten/kota. Kedua, membutuhkan partisipasi dalam pengetahuan dalam permasalahan gizi.
2.	<i>Collaborative governance dalam pencegahan stunting</i>	Amy Yayuk Sri Rahayu (2020)	<i>Journal E3S Web of Conferences</i> , Vol. 211 https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/71/e3sconf_jessd2020_01014.pdf	<ul style="list-style-type: none"> • Pada pelaksanaan kolaborasi ditemukan permasalahan, yakni kurang adanya keterkaitan antar OPD dalam mencapai target sehingga pengukuran kinerja tim hanya dapat dilakukan oleh dinas kesehatan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan <i>stunting</i> melalui <i>collaborative governance</i> belum baik dan belum menunjukkan keberlanjutan serta dampak yang nyata.
		Leli Herlianti (2022)	<i>Journal of Management</i> , Vol. 12 No. 02. https://enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/download/487/399	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kolaborasi seperti peran dan bentuk koordinasi antara beberapa pemangku kepentingan. Kemudian meneliti tentang keterkaitan antar OPD dalam mencapai target sehingga dapat dilakukan pengukuran setiap kinerja tim.
		Nani Supriyatni, Andiani,	Jurnal Biosainstek,	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dalam proses pencegahan dilakukannya

		Agustin Rahayu, Suryani Mansyur, Diah Merdekawati Surasno, Tutik Lestari, Musiana, Monisa A. Hi Djafar (2021)	Vol. 03 No. 02. http://jurnal.umm.ac.id/index.php/BIOSAINST/EK/article/view/735	kolaborasi pada pencegahan <i>stunting</i> melalui program 1000 HPK. Program ini diawali dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, melalui analisis hasil <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> .
3.	<i>Collaborative governance</i> dalam penanggulangan <i>stunting</i>	Ipan, Hanny Purnamasari, dan Evi Priyanti (2021)	Jurnal KINERJA, Vol. 18 No. 3. https://jurnal.feb.unmu.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/9665/1489	<ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan dapat ditunjukkan dari pengamatan dalam proses <i>collaborative governance</i> pada penanggulangan <i>stunting</i> dengan adanya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat, selain itu juga terdapat penurunan angka <i>stunting</i> sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan kolaborasi.
		Evalia Nuranita Putri dan Herbasuki Nurcahyanto (2021)	<i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , Vol. 10 No. 02. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/30594/25222	<ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan adanya keberhasilan dalam <i>collaborative governance</i> dengan menggunakan teori Ansell dan Gash yang tercapainya beberapa komponen dan ditunjukkan dengan adanya penurunan angka <i>stunting</i> melalui kegiatan kelas <i>stunting</i> yang diadakan setiap bulan di Balai Desa Kalirandu. Tetapi ditemukan beberapa hambatan dalam proses kolaborasi seperti kurangnya komitmen

				dari kepala desa, keterbatasan SDM, dominasi dari sektor kesehatan dan permasalahan dalam pengungkapan data.
		Sukanti dan Nur Faidati (2021)	Jurnal Caraka Prabu, Vol. 05 No. 01. http://www.ejournal.fisi.p.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/download/418/231	<ul style="list-style-type: none"> Keberhasilan dalam <i>Collaborative governance</i> ditunjukkan dengan tercapainya prinsip, seperti keterlibatan prinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Selain itu juga menunjukkan adanya penurunan angka <i>stunting</i>. Tetapi pada pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terdiri dari SDM yang berkualitas, SDA yang mendukung dan anggaran. Sedangkan faktor penghambat berupa kondisi lingkungan yang kurang sehat, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dan pola didik orang tua yang dipengaruhi tingkat pekerjaan.
		Neni Nurhaeni, Suryati Badrin, Dinarti Made Riasmini, dan Eska Riyanti (2021)	<i>Jurnal Health Sains</i> . Vol.2,No.5 https://jurnal.healthsains.co.id/index.php/jhs/article/view/158/238	<ul style="list-style-type: none"> Upaya dalam peningkatan pengetahuan dalam penanggulangan <i>stunting</i> melalui <i>collaborative governance</i> dengan metode penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan

				pengetahuan masyarakat. Kolaborasi menghasilkan peningkatan berat badan anak, pengetahuan ibu dan kepuasan layanan IPC (<i>Interprofessional Collaboration</i>).
		Sugeng Wiyono, Ruth Elenora. K.S., Junaedi, Atang Saputra, Didik Marsigit, Mega Damayanti, Umayra, Amsiah, Citra, Riri (2021)	Jurnal Poltekes Kemenkes Tasikmalaya, Vol. 01 No. 02. http://ejurnal.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/Pengmas/article/view/826	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan seminar yang merupakan proses dari upaya kolaborasi dalam penanganan <i>stunting</i> menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dari kegiatan pelatihan dan melakukan tindak lanjut kegiatan dengan mendatangi rumah orang tua balita <i>stunting</i> untuk memberi edukasi.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Stunting

1.6.1.1. Pengertian *Stunting*

Stunting dapat diidentifikasi melalui ukuran panjang anak atau tinggi badan anak. Pada usia kurang dari dua tahun digunakan ukuran panjang telentang anak dan untuk usia dua tahun digunakan pengukuran menggunakan tinggi badan anak. Menurut WHO (*World Health Organization*)(2008) terdapat ambang batas (*Z Score*) dalam pengukuran tinggi badan dalam kesepakatan internasional bahwa, dalam kategori balita *stunting* jika panjang atau

tinggi badannya -3 SD s.d. $<-2\text{ SD}$ (standar deviasi)(Onyango & Onis, 2008).

Berdasarkan standar baku WHO, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017) mendefinisikan *stunting* adalah kondisi anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD /standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3SD (*severely stunted*). Terdapat ukuran ideal pada lingkungan yang sehat yaitu apabila terdapat jumlah populasi anak $\geq 2,5\%$ anak dengan pertumbuhan di atas -2SD dalam sebuah wilayah (Leroy & Frongillo, 2019).

1.6.1.2. Faktor Penyebab Stunting

Permasalahan *stunting* yang masih terbilang kronis di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab balita *stunting* terbagi dalam faktor secara langsung dan faktor tidak langsung. faktor penyebab secara langsung berhubungan dengan kesehatan baik pada saat prakonsepsi, ibu hamil, ibu menyusui, dan pertumbuhan balita. Sedangkan untuk faktor penyebab secara tidak langsung berasal dari keadaan perekonomian, sosial dan kurangnya pengetahuan keluarga.

Penyebab *stunting* secara langsung berdasarkan kesehatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni terjadi anemia zat besi pada ibu hamil, Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada bayi, bayi menderita diare, bayi menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas), bayi tidak

mendapat ASI eksklusif, makanan balita yang kurang beragam, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi (Heryanto & Martha, 2019).

Sedangkan, menurut Ulfah dan Nugroho (2020) faktor-faktor penyebab tidak langsung *stunting*, yaitu: faktor tingkat pendidikan yang masih rendah, faktor pernikahan dini yang menyebabkan kurangnya pengetahuan, serta faktor pekerjaan dan pendapatan orang tua. Faktor pendidikan dengan faktor pernikahan dini saling berhubungan yang kemudian menyebabkan kurangnya pengetahuan dalam memilih makanan yang bergizi balita agar tidak berisiko *stunting*. Kemudian pada faktor pekerjaan dan pendapatan orang tua berhubungan dengan kemampuan sebuah keluarga dalam memenuhi gizi balita.

Menurut Dasman (2019) terdapat empat dampak yang terjadi pada penderita *stunting*, yaitu: terhambatnya perkembangan psikomotorik anak dan kemampuan kognitif yang lemah; kurang bisa menguasai ilmu pengetahuan dan sulit berprestasi pada bidang olahraga; lebih mudah terserang penyakit degeneratif; serta berpengaruh pada kualitas SDM.

1.6.1.3. Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* dalam *Collaborative Governance*

Pemerintah pada saat ini dalam melaksanakan program ataupun pelaksanaan sebuah kebijakan menerapkan konsep *Collaborative governance* sebagai faktor pendukung dalam capaian

keberhasilan suatu program atau kebijakan. Kolaborasi merupakan proses kerja sama diantara beberapa pihak agar tercapainya sebuah tujuan. Sedangkan *collaborative governance* merupakan kerjasama dalam tata kelola pemerintahan dengan beberapa peran pemangku kepentingan agar dapat terlaksananya suatu tujuan. Teori *collaborative governance* merupakan sebuah penyelarasan dari satu atau lebih dari lembaga publik sebagai aktor dalam pengambilan maupun pelaksanaan keputusan yang bersifat formal, adanya kesepakatan dan bijaksana (Ansell & Gash, 2007).

1. Pencegahan *Stunting*

Dalam upaya percepatan penurunan angka *stunting* di Kota Metro, terdapat Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 416/KTPS/B-02/2021 Tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting*. Dalam surat keputusan tersebut terdapat 11 kelurahan yang menjadi lokus *stunting* tahun 2022. Kemudian melalui surat keputusan Walikota metro terdapat delapan aksi dalam penurunan *stunting* yaitu analisis situasi program penurunan *stunting*; penyusunan rencana kegiatan; rembuk *stunting*; peraturan bupati/wali kota tentang peran desa; pembinaan kader pembangunan manusia; sistem manajemen data *stunting*; pengukuran dan publikasi data *stunting*; dan *review* kinerja tahunan.

Pencegahan sangat diperlukan agar selalu dapat menekan angka *stunting* untuk selalu berada pada ketentuan WHO yakni di bawah 20%

pada setiap negara. Oleh karena itu pemerintah menerapkan strategi nasional dalam percepatan pencegahan *stunting* 2018-2024. Dalam Perpres No. 42/2013 memberikan mandat kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) untuk memimpin percepatan perbaikan gizi dalam upaya pencegahan *stunting* dengan partisipasi kementerian atau lembaga yang relevan. Tujuannya yakni untuk memastikan percepatan pencegahan *stunting* agar menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat pada semua tingkatan, seperti pada tingkat kepemimpinan presiden dan wakil presiden; kepemimpinan pemerintah daerah; kepemimpinan pemerintah desa; dan keterlibatan swasta, *civil society*, dan komunitas (Satriawan, 2018).

Selain itu, upaya pencegahan *stunting* yang dijelaskan oleh Trihono dkk. (2015) dalam Lembaga Balitbangkes adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil

Kebutuhan makanan bergizi dapat berupa pemenuhan suplementasi zat besi (Fe), suplementasi energi dan protein yang seimbang untuk ibu hamil kurang gizi, suplementasi kalsium. Selain pemenuhan kebutuhan gizi, pemantau kesehatan ibu hamil juga menjadi perhatian seperti penanggulangan penyakit cacangan, pengobatan malaria dan penggunaan kelambu yang mengandung insektisida.

2. Pemberian ASI eksklusif dan MPASI pada balita

Program 1000 Hari Pertama Kesehatan (HPK) yakni terjadi pada 270 hari (9 bulan masa kehamilan ibu) dan ditambah 730 hari (0-2 tahun) setelah anak lahir. Pada masa kehamilan ibu sudah dijelaskan di atas mengenai pemenuhan gizi, sedangkan untuk pemberian ASI eksklusif pada balita dilakukan usia 0-6 bulan dan didukung dengan MPASI yang berkualitas pada umur setelah enam bulan.

3. Pemantauan tumbuh kembang balita

Posyandu balita merupakan kegiatan yang dapat menjadi strategis dalam pemantauan tumbuh kembang balita, karena adanya kegiatan rutin pengukuran pertumbuhan berat badan maupun tinggi badan dan juga dapat mendeteksi dini apabila terjadi gangguan pertumbuhan.

4. Kebersihan lingkungan

Menjaga lingkungan yang bersih dapat mengurangi penyebaran penyakit yang berpengaruh pada pertumbuhan anak. Kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan peningkatan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik.

2. Penanggulangan *Stunting*

Selain dalam pencegahan terdapat penanggulangan *stunting* yang menjadi hal penting dalam percepatan penurunan angka *stunting* penanggulangan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, dan pada setiap daerah memiliki program pendukungnya. Kegiatan

penanggulangan *stunting* menurut Hamdie et al. (2020) dapat dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dengan pengoptimalan anggaran dalam penanggulangan *stunting*, menciptakan kolaborasi dalam penanggulangan *stunting*, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui dukungan dari pemerintah. Kemudian menurut Esaa et al. (2021) strategi dalam penanggulangan *stunting* terbagi dalam tiga sektor, yaitu sebagai berikut :

1. *Regional Development Planning*

Perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan menetapkan prioritas anggaran terhadap *stunting*, mengintegrasikan program penanggulangan pada semua tingkatan, memperkuat pengetahuan masyarakat terhadap *stunting*, percepatan pembangunan fasilitas yang mendukung penanggulangan *stunting*, melaksanakan program perbaikan gizi masyarakat, serta pemanfaatan media dalam informasi mengenai *stunting*.

2. *Community Participation*

Penanggulangan *stunting* dapat dilakukan dengan memperluas partisipasi masyarakat dan *stakeholder*, mengintegrasikan program perbaikan gizi dan permasalahan sanitasi melalui kegiatan sosial masyarakat, serta mendorong kegiatan penanggulangan *stunting* melalui anggaran daerah.

3. *Multistakeholder Cooperation*

Penanggulangan *stunting* dengan keterlibatan *stakeholder* dapat dilakukan dengan peningkatan koordinasi melalui pertemuan rutin, melibatkan pengelolaan data dengan partisipasi pihak akademisi, instansi vertikal dan lembaga penelitian, serta memperkuat kerja sama antar institusi dalam meningkatkan pemahaman publik.

1.6.2. Collaborative Governance

1.6.2.1. Pengertian *collaborative governance*

Istilah *governance* merupakan bentuk perkembangan dari *government*, pada pengertiannya *government* berarti pemerintah sedangkan *governance* berarti pemerintahan. Perkembangannya istilah tersebut diartikan sebagai sebuah reformasi pemerintahan. *Government* yang berarti pemerintah merupakan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kegiatan pemerintahan, seperti presiden, gubernur, bupati/walikota dan sebagainya. Perkembangan tersebut membawa perubahan pada arti *governance* yaitu pemerintahan yang merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pada istilah *governance* melibatkan pemerintah (birokrasi), swasta dan masyarakat sipil (Martua, 2019).

Collaborative governance menurut Haryono (2012) merupakan kegiatan yang dilaksanakan bersama, memiliki kesetaraan tugas, dan bertanggung jawab pada setiap *stakeholder* dan memiliki tujuan yang sama dan memberikan manfaat. Dalam

proses *collaborative governance* menurut Gunawan dan Ma'ruf (2020) adalah sebuah proses yang berdasarkan pada sebuah peraturan tertentu yang dilaksanakan bersama-sama dan saling berinteraksi sehingga saling menguntungkan antar *stakeholder* yang terlibat. *Collaborative governance* menurut Retno dkk. (2020) merupakan sebuah cara dalam pengelolaan suatu hal yang melibatkan *stakeholder* baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi pada satu tujuan dan terjadi musyawarah untuk keputusan bersama.

Dalam teori *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash (2007) memiliki enam kriteria penting dalam proses kolaborasi, seperti: Diskusi rencana kolaborasi dilakukan oleh institusi publik; Partisipasi peserta kolaborasi harus mencakup non-pemerintah; Partisipasi peserta harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan; Forum kolaborasi dilaksanakan secara rutin; Kebijakan yang dihasilkan harus berdasarkan kesepakatan bersama; Kolaborasi yang dilakukan harus berfokus pada pelaksanaan kebijakan publik atau manajemen publik.

Tujuan dari *collaborative governance* menurut Yunas dan Nailufar (2019) yaitu untuk mencapai sebuah tujuan atau target dalam kegiatan kerja sama serta dalam membentuk efektivitas pembangunan. Dalam *collaborative governance*, adanya kolaborasi

ditujukan bagi pihak yang tidak bisa mencapai target sendirian sehingga dengan kolaborasi maka akan lebih efektif pelaksanaannya. Tujuan pada *collaborative governance* adalah dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama.

1.6.2.2. Proses *Collaborative governance*

Pada *collaborative governance* proses merupakan yang penting dalam membentuk dan melaksanakan sebuah kolaborasi. Dalam proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada hasil yang diperoleh. Ansel dan Gash menjabarkan lima (5) proses *collaborative governance* sebagai berikut :

1. *Face-to-face dialogue* (dialog tatap muka)

Dialog tatap muka merupakan tahapan penting dan diperlukan dalam proses kolaborasi. Dialog tatap muka ini bertujuan agar dapat menyelesaikan masalah dengan perbedaan stereotip pada masing-masing aktor supaya dapat dipecahkan atau dibaurkan dalam dialog tatap muka.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi berawal dari adanya perbedaan stereotip pada masing-masing aktor kolaborasi. Percepatan membangun kepercayaan harus lebih cepat diterapkan karena akan berpengaruh dalam durasi pelaksanaan suatu proses

kolaborasi. Tujuannya ialah agar dapat menerapkan strategi kolaborasi dengan cepat karena tidak membuang banyak waktu.

3. *Commitment to The Process* (komitmen untuk proses)

Komitmen untuk proses kolaborasi dapat ditunjukkan melalui sikap saling ketergantungan yang tinggi antara masing-masing aktor kolaborasi. Komitmen dalam proses kolaborasi dapat dilakukan melalui strategi dalam pembangunan berkelanjutan agar aspek komitmen untuk proses dapat terus berjalan dengan baik.

4. *Shared Understanding* (pemahaman bersama)

Pemahaman bersama harus diterapkan pada setiap aktor kolaborasi dengan mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai bersama. Oleh karena itu melalui pemahaman bersama dapat membentuk sebuah kesepakatan bersama.

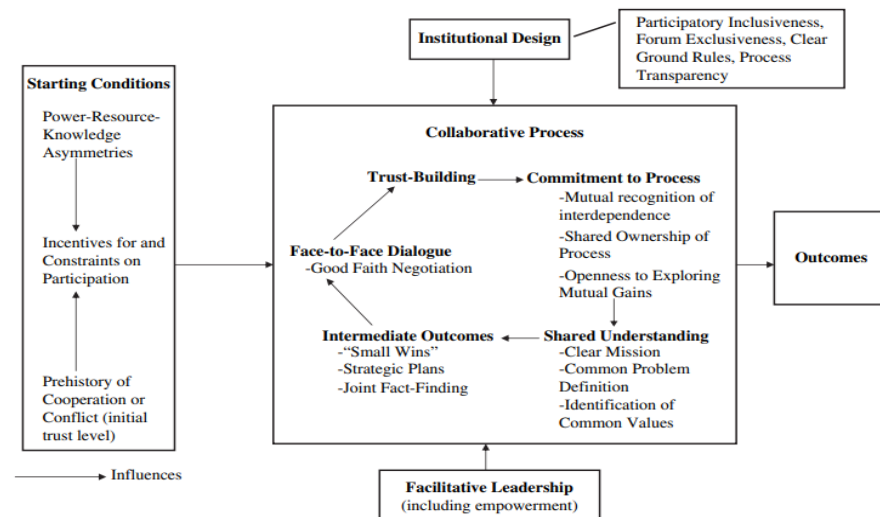
5. *Intermediate Outcomes* (hasil jangka menengah)

Hasil jangka menengah dalam proses kolaborasi berfungsi sebagai nilai dasar dalam keberhasilan kolaborasi. Hasil jangka menengah dapat disebut juga *small wins* (kemenangan kecil) yang kemudian dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus membangun kepercayaan dan komitmen yang baik.

Ansell dan Gash (2007) menerapkan tiga komponen utama dalam teori *collaborative governance*, yaitu :

1. Waktu
2. Kepercayaan
3. Interpedensi

Gambar 1. 2 Model Collaborative Governance Ansell and Gash



Sumber : (Ansell & Gash, 2007)

Ansell dan Gash kemudian melanjutkan bahwa terdapat strategi dalam pelaksanaan kolaborasi yakni menggunakan media platform. Peran dari media platform yaitu berperan sebagai wadah pengumpulan informasi yang didapatkan dan bersifat agrerat sehingga dapat mengetahui secara lebih efektif dan efisien sebuah proses kolaborasi. Selain itu dapat memunculkan dorongan dalam menghasilkan proses atau interaksi kolaboratif (Ansell & Gash, 2017).

Berdasarkan kriteria dan strategi di atas dalam keberhasilan suatu kolaborasi menurut Ansell dan Gash adalah dilaksanakan suatu kolaborasi secara sistematis, dapat diawasi oleh semua partisipasi peserta, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi.

1.6.3. **Penta Helix dalam Collaborative Governance**

Dalam *collaborative governance*, terdapat stakeholder yang melaksanakan sebuah kolaborasi. Jenis-jenis dari *collaborative governance* terbagi dalam jumlah stakeholder yang terlibat, seperti *Triple helix*, *Quadruple helix* dan *Penta Helix*. *Triple Helix* terdiri dari tiga aktor kolaborasi yaitu pemerintah, akademisi dan pelaku usaha/sector. Pada *Quadruple Helix* dengan empat aktor kolaborasi ditambahkan peran media dalam *collaborative governance*. Kemudian pada *Penta Helix* yang melibatkan lima aktor kolaborasi yakni dengan adanya keterlibatan masyarakat sebagai penekanan aspek lingkungan alami dalam faktor sosial dan ekonomi (Carayannis & Campbell, 2010). *Penta helix* merupakan sebuah pengembangan yang bersifat inovatif dalam kolaborasi dari *triple helix* dan *dexa helix* yang kemudian terdiri dari lima aktor atau pelaku (Ansell, 2012). Dalam *penta helix* yang disebut juga *quintuple helix* merupakan penambahan *helix* ke lima yang menerapkan lingkungan alami sosial dalam pembangunan berkelanjutan ekologi sosial. Teori ini menegaskan bahwa masyarakat dan ekonomi sebagai aktor yang berpengetahuan serta dapat melakukan produksi dan inovasi secara mandiri. Pada konsep kolaborasi penerapan pelaku ekonomi dapat berperan

sebagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan progres dan implementasi suatu kebijakan (Carayannis et al., 2012).

Dalam teori penta *helix* menurut Awaludin et al., (2016) didefinisikan sebagai proses kolaborasi dengan adanya peran penting pelaku usaha dalam perkembangan teknologi melalui pemanfaatan media sebagai strategi dalam industri kreatif digital di Indonesia. Dalam penta *helix* menurut Awaluddin dkk. terdapat lima pemangku kepentingan, yaitu:

1. *The Government as regulator*

Pemerintah sebagai regulator atau pembuat keputusan dan mengatur kebijakan, selain itu pemerintah berperan juga sebagai koordinator dari seluruh aktor pemangku kepentingan. Keberhasilan dari keempat aktor lainnya sangat tergantung atas kemampuan Pemerintah dalam menjalankan perannya.

2. *Academics as conceptor*

Akademisi sebagai konseptor atau pembuat rencana kebijakan, selain itu akademisi juga berperan penting dalam pembentukan konsep berkelanjutan. Peran akademisi sangat membantu dalam perancangan strategi berkelanjutan dengan adanya studi aktif.

3. *Community as an accelerator*

Komunitas atau masyarakat sebagai individu atau kelompok yang relevan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu peran komunitas dalam kolaborasi sebagai pendukung anggota agar dapat bertahan dalam

kegiatan atau program kolaborasi, sehingga dapat lebih mudah menciptakan kebiasaan dalam suatu lingkungan secara alamiah

4. *The media as an expander*

Media sebagai sumber informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Peran penting media dalam proses kolaborasi ialah sebagai kemudahan media hubung antara aktor kolaborasi.

5. *Business as an enabler*

Pelaku usaha, sebagai pendorong dengan melakukan bisnis dalam meningkatkan dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pelaku usaha juga dapat membantu dalam proses kolaborasi dengan pembantuan dana pada program atau kegiatan pada lokasi masing-masing, agar mempercepat capaian program.

1.6.4. Implementasi Kebijakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan *stunting*

Pada sebuah program atau kegiatan pemerintah merupakan sebuah bentuk dari implementasi kebijakan. Tahapan pada sebuah kebijakan terdiri dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi dari kebijakan. Oleh karena itu Kota Metro kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Metro Nomor 416/KTPS/B-02/2021 Tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kota Metro. Pada proses penurunan dan pencegahan *stunting* dilakukan secara kolaboratif dengan lima aktor kolaborasi, yakni pemerintah, swasta, akademisi, media dan pelaku usaha.

Implementasi kebijakan merupakan proses dalam mencapai sebuah tujuan. Pendekatan implementasi kebijakan dalam George C. Edward III (1980) memiliki sifat dinamis dengan terdapat interaksi dari banyak variabel dan terdapat dua tujuan yakni untuk melihat bagaimana faktor yang dibahas mempengaruhi implementasi dan untuk menjelaskan mengapa faktor tersebut dapat muncul sebagai penghambat implementasi kebijakan. Edward III menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan memiliki empat variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keputusan kebijakan dan perintah implementasi harus disampaikan kepada setiap pembuat keputusan secara tepat sebelum dapat diikuti. Penyampaian dari keputusan dan perintah implementasi kebijakan harus secara tepat, akurat dan konsisten. Pemahaman pada setiap pemangku kepentingan dapat mendukung keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Dalam komunikasi terdapat indikator yang dapat digunakan sebagai pengukur, sebagai berikut:

- a. Transmisi. Pada proses komunikasi sering terjadi salah pengertian pada keputusan yang dibuat, bahkan bisa memunculkan sikap tidak peduli pada keputusan. Oleh karena itu jika penyaluran komunikasi dalam keputusan terjadi dengan baik maka akan berjalan dengan baik pula proses implementasi kebijakan.
- b. Kejelasan. Keputusan pada kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak menghalangi implementasi kebijakan

- c. Konsistensi. Implementasi dari keputusan dan perintah haruslah dilakukan secara konsisten hal ini bertujuan agar tidak membingungkan dalam pelaksanaannya.

2. Sumber Daya

Pada pelaksanaan implementasi sumber daya menjadi faktor krisis dikarenakan *skill* atau kemampuan pada pelaksana implementasi kebijakan. *Skill* dari pelaksana menjadi penting karena berhubungan dengan tantangan implementasi. Indikator dalam sumber daya adalah sebagai berikut:

- a. Staff, merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia (SDM) sehingga diperlukannya staff yang dapat menguasai dan memahami materi keputusan dan perintah implementasi, selain itu diperlukan juga staff yang memadai dalam proses implementasi kebijakan.
- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan informasi dapat dibedakan dalam dua bentuk yakni informasi dalam tata cara pelaksanaan implementasi dan informasi mengenai data dari tanggung jawab dan kepatuhan pada pelaksana implementasi kebijakan yang bertujuan agar dapat berjalan dengan efektif.
- c. Wewenang. Dalam implementasi kebijakan kewenangan setiap pemangku kepentingan merupakan sebuah otoritas atau legitimasi, sehingga kewenangan harus dipertanggungjawabkan agar dapat berjalan efektif dan tidak ditemukan penyalahgunaan wewenang.

Dalam wewenang juga berhubungan dengan penggunaan anggaran yang disediakan untuk menjalankan kebijakan.

- d. Fasilitas. Dukungan dari fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, hal ini dapat memudahkan mencapai tujuan karena adanya dukungan sarana dan prasarana.

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana implementasi menjadi faktor penting selanjutnya dalam keberhasilan implementasi. Apabila pelaksana bekerja dengan baik maka akan lebih efektif dalam melaksanakan implementasi sesuai dengan rencana awal. Tetapi sebaliknya, apabila sikap tidak menunjukkan tanggung jawabnya maka dalam praktiknya akan menjadi bias. Indikator dalam disposisi yakni sebagai berikut:

- a. Efek disposisi. Sikap dari para pelaksana implementasi kebijakan dapat menjadi tantangan dan hambatan, sehingga pemilihan dari pelaksana harus dilakukan secara cermat agar dapat menjalankan implementasi dengan baik.
- b. Pengaturan dalam birokrasi. Berhubungan dengan efek disposisi maka haruslah melakukan pengaturan dalam penunjukan dan pengangkatan staf sesuai dengan kemampuan.
- c. Insentif. *Reward* atau hadiah untuk pelaksana dapat menjadi faktor pendukung mereka dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam suatu birokrasi sebagai pelaksana implementasi kebijakan diperlukan adanya struktur birokrasi yang ideal sehingga tidak menjadi kelemahan karena adanya tuntutan staff yang mencukupi. Dalam pelaksanaan diperlukan staff yang banyak kemudian penyusunan birokrasi yang ideal dapat menciptakan kondisi yang kondusif pada sebuah birokrasi. Terdapat faktor yang mendukung struktur birokrasi yang ideal yakni sebagai berikut:

- a. Membuat *standard operating procedures* (SOPs). Prosedur dalam sebuah birokrasi merupakan acuan penting dalam aktivitas rutin para birokrat sehingga diperlukannya prosedur yang fleksibel tetapi tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Fragmentasi birokrasi, tujuannya ialah agar pada setiap birokrat dapat memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Selain itu, fragmentasi ini memiliki kelebihan yakni dapat memberikan efektivitas dalam proses implementasi

1.7. Definisi Konseptual

- a. *Collaborative governance* merupakan upaya dalam pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien dengan keterlibatan para pemangku kepentingan. Sedangkan, teori penta *helix* merupakan pendekatan *collaborative governance* yang menggunakan lima komponen pemangku kepentingan dapat sebagai inovasi.
- b. Pencegahan dan penanggulangan *stunting* merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dalam percepatan penurunan angka *stunting* dengan kegiatan

perbaikan gizi masyarakat, program pada 1000 HPK serta adanya kolaborasi beberapa *stakeholder*.

- c. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan dan perintah yang berupa kebijakan untuk mencapai tujuan.

1.8. Definisi Operasional

Dalam pengukuran keberhasilan proses *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting*, maka definisi operasionalnya adalah:

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Peran Stakeholder dalam Collaborative Governance	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Peran pemerintah dalam membuat regulasi Peran dalam pelaksanaan program percepatan penurunan <i>stunting</i>
	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> Peran dalam membuat konsep kebijakan Peran dalam pembaruan ilmu pengetahuan
	Komunitas Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Peran dalam melaksanakan program secara langsung
	Media	<ul style="list-style-type: none"> Peran dalam penyebaran informasi program dan data <i>stunting</i>
	Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Peran dalam bantuan modal pelaksanaan program Peran dalam bidang perekonomian di masyarakat
	<i>Face-to-face dialogue</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan program percepatan penurunan <i>stunting</i>

Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam pencegahan dan penanggulangan <i>stunting</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal pertemuan rutin antar aktor kolaborasi melalui <i>Rembuk Stunting</i> • Kegiatan kolaborasi percepatan penurunan angka <i>stunting</i>
	<i>Trust Building</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi <i>Rembuk Stunting</i> kepada masyarakat • Transparansi dan akuntabilitas stakeholder dalam pelaksanaan program
	<i>Commitment to the process</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi aktif aktor kolaborasi dalam pelaksanaan program • Koordinasi pada setiap aktor kolaborasi dalam pelaksanaan program
	<i>Shared understanding</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan pelaksanaan tentang kegiatan dan tugas masing-masing aktor kolaborasi dalam pelaksanaan program. • Pengetahuan dan pelaksanaan tujuan sasaran program pada setiap aktor kolaborasi
	<i>Intermediate income</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keberhasilan sementara dalam pelaksanaan program kolaborasi • Capaian dari tujuan dan sasaran program

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan sumber data didapat dari kegiatan wawancara beberapa narasumber dan observasi dalam pengumpulan datanya. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Metro.

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Imam Gunawan (2013) adalah penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang permasalahan manusia dan sosial, penelitian ini berfungsi untuk mengetahui multiperspektif dari beberapa sumber partisipan yang terlibat sehingga mendapatkan makna dari perilaku yang berbeda pada manusia yang terlibat dalam penelitian. Alasan penggunaan penelitian kualitatif pada penelitian ini ialah bertujuan agar dapat menggambarkan suatu gejala, permasalahan, dan fakta pada sebuah peristiwa secara nyata atau asli tanpa adanya manipulasi agar didapatkan pemahaman baru. Penelitian kualitatif deskriptif tidak menampilkan analisis data menggunakan angka melainkan pemaparan menggunakan uraian atau narasi dalam memperoleh perbandingan, memperkaya informasi serta mengidentifikasi hubungan pada data asli.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Kesehatan dan beberapa pihak terkait *collaborative governance* melalui program JAMA-PAI dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Metro, Provinsi Lampung. Kota Metro menjadi lokus Provinsi Lampung dalam percepatan penurunan angka *stunting*. Penelitian ini dilakukan pada lima aktor pada *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Metro, Provinsi Lampung. Pengumpulan data pada lokasi ini ditujukan pada pemerintah, akademisi, komunitas masyarakat, media dan pelaku usaha.

1.9.3. Jenis Data

1.9.3.1. Data Sekunder

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan bacaan seperti buku, artikel jurnal, arsip data maupun berita yang bersumber dari internet dan memiliki keterkaitan dengan proses *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kota Metro, Provinsi Lampung

1.9.3.2. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini data yang berasal dari wawancara Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, akademisi, komunitas masyarakat, serta pelaku usaha yang terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting*

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

1.9.4.1. Wawancara Tidak Terstruktur

Dalam mendukung pengumpulan data, dilakukan wawancara beberapa narasumber sehingga dapat menemukan perbedaan atau persamaan dari progres yang menjadi objek penelitian. Menurut Mamik (2015) wawancara terdiri dari wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur dalam pengumpulan data. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara pengajuan pertanyaan yang sesuai dengan daftar pertanyaan. Sedangkan untuk wawancara tidak terstruktur wawancara

dilaksanakan secara berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian, bersifat fleksibel dan terbuka. Menurut Gunawan (2013) wawancara tidak terstruktur dapat dimulai dengan pertanyaan umum atau menggunakan kata kunci akan tetapi tidak ada pertanyaan tetap secara rinci. Pada penelitian ini terdapat beberapa tokoh yang akan diwawancarai mengenai *collaborative governance* dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting*

Tabel 1. 3. Informan Penelitian

No.	Stakeholder	Jumlah	Narasumber
1	Pemerintah	1 (satu) orang	<ul style="list-style-type: none"> • Ika Yuniarti, S.TP.,M.P.P.,M.Eng. BAPPEDA (Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan) • Diah Meirawati, SKM., M.Kes. Dinas Kesehatan (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat)
2	Media	1 (satu) orang	<ul style="list-style-type: none"> • Yudha Yuniarto, S.IP Dinas Komunikasi dan informatika (sebagai sekretaris dinas komunikasi dan informatika)
3	Akademisi	1 (satu) orang	<ul style="list-style-type: none"> • Islamiyati, AK.,MKM.
4	Masyarakat	2 (dua) orang	<ul style="list-style-type: none"> • Siti Rohayati (sebagai kader Posyandu dan kader PKK) • Umi Sumidah (sebagai kader Posyandu dan kader PKK)
5	Pelaku Usaha	2 (dua) Orang	<ul style="list-style-type: none"> • Idha Septriana (sebagai kader PKK dan Pengurus Bank sampah) • Yati (Sebagai kader PKK dan Kelompok Wanita Tani)

1.9.4.2. Observasi

Observasi menurut Hasanah (2017) merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan, dalam observasi memudahkan dalam mendapatkan informasi tentang dunia sekitar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Metro dalam *collaborative governance* untuk pencegahan dan penanggulangan *stunting* pada pemerintah, akademisi, media, komunitas masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam observasi ini mengamati kegiatan dalam percepatan penurunan *stunting* pada tingkat desa sampai kota.

1.9.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Josef Raco (2018) merupakan material yang dapat tersimpan secara tertulis maupun audiovisual. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan fakta yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi melalui karya tulis, foto, video, dokumen, dan sebagainya yang diperoleh dari informasi di Kota Metro.

1.9.5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Proses analisis data diawali dengan pencarian sumber data yang akurat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang berupa perbedaan pada objek penelitian. Teknik analisis data bertujuan untuk penarikan kesimpulan

berdasarkan hasil dari pengumpulan data pada objek penelitian (Mamik, 2015).

1.9.5.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif menurut Mamik (2015) kegiatan pengumpulan data kualitatif harus dilakukan secara sendiri dan tidak dapat diwakilkan untuk melaksanakan wawancara, hasil penelitian berupa deskriptif dengan memperhatikan hasil wawancara terhadap sebab dan akibat pada variabel yang diteliti sehingga menunjukkan saling mempengaruhi. Pada pengumpulan data, penulis memasukkan data yang diperoleh dari sumber-sumber data berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang dapat berupa narasi atau uraian.

1.9.5.2. Reduksi Data

Tahapan reduksi data merupakan lanjutan dari proses pengumpulan data agar mendapat data yang dapat diringkas. Reduksi data dalam penelitian adalah proses pemilihan dari data yang diperoleh, penyederhanaan informasi dari data yang diperoleh, dan proses menggolongkan data yang telah diperoleh dari sumber data (Rijali, 2019).

1.9.5.3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi dari hasil pengumpulan dan reduksi data secara tersusun sehingga

memungkinkan untuk dapat melakukan proses penyimpulan atau pengambilan tindakan (Rijali, 2019). Penyajian data berfungsi untuk memberikan gambaran dari hasil pengumpulan data atau informasi agar lebih mudah untuk dipahami (Otok & Ratnaningsih, 2019).

1.9.5.4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisa data yang merupakan tindakan lanjutan dari analisa data. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang berdasarkan pada hasil analisis data, kesimpulan disajikan dengan narasi deskriptif (I. Gunawan, 2013).